

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Karena pembangunan di daerah menjadi salah satu indikator atau penunjang demi terwujudnya pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan tentang Pemerintahan Daerah dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Hal tersebut sesuai dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai revisi dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU No. 12 tahun 2008 bahwa pemerintahan dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan maka dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah provinsi dan pemerintah kota sebagai daerah otonomi. Selain itu, juga dikeluarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sebagai revisi dari UU No. 25 tahun 1999.

Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan daerah otonomi yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus keuangan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan No 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5

Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan No 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Pertanggung jawaban pemerintah kepada publik yang bersih merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dimana untuk mewujudkannya memerlukan media tertentu. Salah satu alat untuk memfasilitasi tercapainya laporan keuangan pemerintah daerah yang kompetitif yaitu laporan keuangan pemerintah daerah tersebut digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan yang akurat dengan anggaran, menilai kondisi dan hasil operasional, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya serta membantu mengevaluasi tingkat efisien dan efektivitas.

Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan didalam melaksanakan pengelolaan keuangan, harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan suatu tolak ukur, yaitu dengan menggunakan pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan agar dapat dijadikan

sebagai bahan evaluasi untuk memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio* dan rasio pertumbuhan (Halim, 2004: 150). Jadi analisa kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasi kinerja, membantu menungkapkan dan memecahkan masalah yang ada.

Reformasi pengelolaan keuangan daerah sendiri diawali dengan adanya tuntutan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Guna mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik. “Reformasi manajemen sektor publik harus dan sangat ditentukan oleh reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah” (Mardiasmo, 2002). Implikasi adanya otonomi daerah dan daerah otonom yang berdasarkan asas desentralisasi telah memberikan dampak positif bagi daerah.

Salah satu cara agar pihak publik dapat memantau pemerintah dalam pengelolaan keuangan adalah melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang

relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu akun yang termuat didalam laporan keuangan dan merupakan bukti pertanggungjawaban yang dipublikasikan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan guna memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama, karena anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Laporan Realisasi Anggaran menduduki prioritas yang lebih penting dan merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum kemudian disyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas.

Berikut ini disajikan data LRA (Laporan Realisasi Keuangan) kabupaten Timor Tengah Selatan tahun Anggaran 2014-2016.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Timor Tengah
Selatan Tahun Anggaran 2014 -2016 (Dalam Milyaran Rupiah)

Tahun	Uraian	Target	Realisasi
2014	<i>Pendapatan</i>	<i>922.942.515.762</i>	<i>920.739.659.117</i>
	PAD	48.452.456.683	61.898.590.785
	Pendapatan Tranfer	873.013.459.079	857.878.518.332
	Lain -lain pendapatan yang sah	1.476.600.000	962.550.000
	<i>Belanja</i>	<i>1.071.625.158.390</i>	<i>826.584.424.153</i>
	Belanja Operasi	843.363.976.144	692.732.418.894
	Belanja Modal	224.761.182.246	133.129.061.769
	Belanja Tak Terduga	3.500.000.000	722.943.490
2015	<i>Pendapatan</i>	<i>1.093.576.310.961</i>	<i>1.075.717.057.486</i>
	PAD	65.016.162.478	76.086.059.849
	Pendapatan Tranfer	1.028.560.148.483	999.630.997.637
	Lain -lain pendapatan yang sah		
	<i>Belanja</i>	<i>1.148.785.216.729</i>	<i>918.703.018.649</i>
	Belanja Operasi	901.022.846.219	758.775.282.223
	Belanja Modal	244.262.370.510	159.844.079.926
	Belanja Tak Terduga		
2016	<i>Pendapatan</i>	<i>1.297.426.566.306</i>	<i>1.201.549.701.401</i>
	PAD	77.610.758.000	71.848.806.283
	Pendapatan Tranfer	1.219.815.808.306	1.129.700.895.118
	Lain -lain pendapatan yang sah		
	<i>Belanja</i>	<i>1.262.240.569.893</i>	<i>1.056.107.874.425</i>
	Belanja Operasi	977.410.873.607	848.463.556.485
	Belanja Modal	280.063.492.520	205.776.062.468
	Belanja Tak Terduga	4.766.203.766	1.868.255.472

Sumber: BPKAD Kab. TTS

Dari tabel di atas dapat kita lihat Target Pendapatan pada Kabupaten Timor Tengah Selatan selalu meningkat setiap tahun. Namun peningkatan tersebut tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai. Realisasi selalu dibawah target yang ditetapkan. Tahun 2014, target Pendapatan sebesar 922.942.515.762 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 920.739.659.117. Tahun

2015, target Pendapatan sebesar Rp. 1.093.576.310.961, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.075.717.057.486 dan Tahun 2016 target Pendapatan sebesar Rp. 1.297.426.566.306, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 361.201.549.701.401. Relatif kecilnya realisasi Pendapatan kabupaten TTS disebabkan oleh kemampuan untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah masih rendah dibandingkan dengan potensi yang ada.

Pada Bagian Belanja target pemerintah daerah Kabupaten. TTS juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun realisasi selalu tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2014 target belanja sebesar Rp. 1.071.625.158.390, sedangkan realisasi sebesar Rp. 826.584.424.153. di tahun 2015 target belanja sebesar Rp. 1.148.785.216.729, realisasi sebesar Rp. 918.703.018.649 dan tahun 2016, target sebesar Rp. 1.262.240.569.893 realisasi hanya sebesar Rp. 1.056.107.874.425. hal ini disebabkan karena adanya kenaikan anggaran pada bagian belanja modal yang cukup signifikan.

Pendapatan daerah merupakan sumber untuk membiayai belanja daerah, baik belanja langsung maupun tidak langsung. Dalam pengalokasiannya, belanja langsung harus mendapatkan porsi paling besar daripada belanja tidak langsung, karena belanja langsung merupakan pengeluaran biaya untuk pembangunan yang nantinya berguna untuk kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan publik. Melalui kewenangan otonomi yang diberikan kepada pemerintah Timor Tengah Selatan, maka sudah menjadi tanggungjawab daerah untuk membelanjakan

anggaran yang ada agar dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk pembangunan daerah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Belanja daerah di susun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari yang direncanakan dan diupayakan agar Belanja Langsung mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa. Menurut pengamat Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara, Wahyu Ario Pratomo mengatakan bahwa porsi yang ideal adalah 60% digunakan untuk belanja langsung, dan 40% untuk belanja tidak langsung. Jika dibandingkan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di Tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 pada kabupaten Timor Tengah Selatan, komposisi pengalokasian belanja daerah terhadap belanja langsung dan tidak langsung yang terjadi tidak memenuhi syarat komposisi ideal karena belanja langsung selalu lebih besar dari belanja tidak langsung dan hal ini akan berdampak pada kualitas

Di sisi lain, fenomena paling mencolok dari adanya penerapan otonomi daerah adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan bahwa pemerintah daerah kehilangan keleluasan untuk bertindak (*local discretion*) untuk mengambil keputusan-keputusan penting, dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap pemerintah daerah. Pembangunan di daerah terutama fisik memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal

antar daerah terhadap pusat sebagai akibat dari pembangunan juga semakin besar yang terlihat dari relatif rendahnya pendapatan asli daerah dan didominasi oleh transfer dari pusat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah masih mempunyai ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat serta belum mampu memanfaatkan potensi asli daerah yang ada secara optimal untuk memenuhi kebutuhan daerah.

Keberhasilan otonomi juga tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah (PP No.58 tahun 2005, pasal 4). Pada pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting, karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan keuangan dalam era otonomi daerah sering di ukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah.

Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi

daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD, Halim (2012:212).

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan yang telah ditetapkan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2009:182).

Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan adalah dengan melakukan analisis rasio terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi fiskal, Rasio Efektifitas dan Efisiensi, Rasio Kecerahan Belanja, dan Analisis Pertumbuhan (Halim, 2012:230). Analisis rasio keuangan ini diharapkan dapat

menjadi suatu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai pengambil andil terbanyak dalam upaya perkembangan suatu daerah.

Dalam penelitian ini variabel yang akan di uji yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Realisasi Anggaran) Kabupaten Timor Tengah Selatan 2014-2016. Penelitian ini menggunakan pengujian data tahun Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2014-2016 dengan harapan mampu memberi informasi yang lebih relevan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan mengambil judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014 – 2016 ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui

bagaimana kinerja keuangan pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014 – 2016 yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bagi calon peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian yang lebih lanjut yang berkaitan dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.